BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan No. 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama $\frac{2}{3}$ kepada mantan istri dan $\frac{1}{3}$ untuk mantan suami didasarkan pada fakta bahwa terdapat pengabaian kewajiban salah satu pihak, dalam hal ini Penggugat (mantan suami) yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membiayai atau menafkahi anak-anaknya pasca perceraian. Dalam pertimbangannya Hakim juga telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan melihat kontribusi para pihak selama perkawinan dan pasca perceraian.
2. Putusan No. 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb telah memenuhi prinsip keadilan dengan mengintegrasikan berbagai teori yang relevan, seperti keadilan moral (*moral justice*), keadilan distributif, teori hukum progresif, dan teori keadilan menurut konsepsi hukum Islam. Hakim tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, sehingga putusan ini telah mencerminkan keadilan substantif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Saran untuk majelis hakim adalah agar terus mempertahankan dan melahirkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap putusannya, karena hal ini merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan hukum. Mengutamakan nilai-nilai tersebut akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil secara formal, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Hal ini juga sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Selain itu hakim diharapkan untuk terus berani menerapkan sikap progresif untuk memberikan solusi yang lebih relevan dan adil sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- 2) Bagi pihak yang menghadapi sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan sebaiknya mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah kekeluargaan (non-litigasi) sebelum ke ranah pengadilan, karena proses ini lebih memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*). Penyelesaian secara musyawarah dapat membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis, dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak, serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian melalui non litigasi tidak hanya akan lebih efisien dan mengurangi beban emosional, tetapi juga dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.